

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi dan Ruang Lingkup Gerakan Sosial

Membahas suatu konsep seperti gerakan sosial, perlu adanya sebuah kejelasan terlebih dahulu terhadap konsep tersebut sehingga dapat diperoleh batasan dan koridor yang jelas akan definisi yang berlaku dalam bidang akademis atau public. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang gerakan sosial ini diantaranya adalah Darmawan Triwibowo yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebetuk aksi kolektif dengan orientasi konflikktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam suatu koalisi. Jelas bahwa definisi gerakan sosial yang agak inklusif ini dapat mendeskripsikan gejala “*civil society in action*”, yang dapat diartikan sebagai gerakan sosial yang berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok *civil society* dalam mendukung atau menentang perubahan sosial.¹⁴

Gerakan sosial yang sangat beragam ini dapat disederhanakan dan ditipologikan dilihat dari besarnya perubahan sosial yang dikehendaki dan tipe

¹⁴Darmawan Triwibowo.2006.Gerakan sosial wahana *civil society* bagi demokratisasi. LP3ES.:Jakarta hal 8

perubahan sosial yang dikehendaki seperti yang terlihat dalam tipologi David Arbele sebagai berikut:

BESARAN	TIPE	
	Perubahan Perorangan	Perubahan Sosial
Sebagian	Alternative Movements	Reformative Movements
Menyeluruh	Redemptive Movements	Transformative Movements

Alternative Movements berupaya untuk mengubah sebagian perilaku orang. Sementara *Redemptive Movements* mencoba mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh. Tipe berikutnya yakni *Reformative Movements* mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang lingkup yang terbatas, dan yang terakhir *transformative movements* adalah gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh.¹⁵

Dalam tiga decade terakhir di Indonesia pertumbuhan organisasi *civil society* semakin marak khususnya organisasi nonpemerintah akan tetapi disini masih dipertanyakan apakah hal ini berkorelasi positif dengan menguatnya proses demokratisasi di Indonesia. Benarkah organisasi-organisasi *civil society* mampu memainkan peran yang essensial (*pivotal role*) untuk mendorong perubahan tata relasi antara Negara dan warganya dalam ranah politik dan ekonomi, hal ini menjai sangat relevan ketika kita mencoba memahami dua kecenderungan besar yang tengah berlangsung secara parallel di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, yaitu penambahan jumlah organisasi *civil society* yang luar biasa pesat

¹⁵ Soenarto, Kamanto. 2000. Pengantar Sosiologi. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit FEUI. hal 196

dan perubahan rezim pemerintahan dari yang otoriter menjadi rezim-rezim yang lebih demokratis.

Secara umum, keberadaan *civil society* memang kerap dipandang sebagai prasyarat penting bagi bekerjanya sistem demokrasi liberal. Sebagai contoh kapitalisme modern dipercaya bisa memupuk tumbuh kuatnya *civil society* berbasis kelas menengah yang pada gilirannya akan mempromosikan demokrasi politik liberal. *Civil society* yang mandiri merupakan suatu entitas yang keberadaannya mampu menjadi kekuatan pengimbang (*balancing forces*) dari kecenderungan-kecenderungan intervensionis Negara. Seperti yang disampaikan BS Hadiwinata (2003):

Civil society adalah kelompok-kelompok asosiasi yang bisa berfungsi sebagai pengerem kekuasaan Negara (sehingga dengan sendirinya selalu bersebrangan dengan Negara), sebagai perantara yang budiman antara kepentingan Negara dan aspirasi local, atau sebagai rangkaian kelembagaan sosial yang saling berinteraksi antar sesamanya dalam suatu struktur formal yang bisa memfasilitasi atau menghambat tata kelola Negara.¹⁶

Secara bersamaan *civil society* juga dipercaya mampu melakukan kekuatan kritis reflektif di dalam masyarakat untuk mencegah atau mengurangi derajat konflik internal akibat dari proses formasi sosial modern. Suatu basis bagi *civil culture* yang mampu membangun basis kepercayaan sosial yang tinggi dikalangan masyarakat serta dukungan yang luas terhadap praktik-praktik dan kelembagaan demokratisasi, dengan hal ini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa *civil society* yang solid dan dinamis akan menjadi pilar utama bagi proses demokrasi.

¹⁶ Hadiwinata, BS. 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia. Developing democracy and managing a movement*. London: Routledge Curzon hal 145

Memang dibutuhkan lebih dari sekedar aktivisme *civil society* untuk mewujudkan demokrasi yang bermakna, suatu tatanan dimana masyarakat secara luas mempunyai kesempatan dan kapasitas untuk menggunakan serta memperbaiki prinsip-prinsip dan kelembagaan demokrasi yang telah ada dengan jalan mempengaruhi, mengendalikan dan berperan serta dalam tata kelola dan pengaturan sector-sektor kehidupan yang penting dalam masyarakat mereka.

Beberapa pertanyaan muncul saat mengamati kuatnya skeptisme terhadap peran *civil society* tersebut. Seberapa riil-kah sebenarnya kontribusi aktivisme *civil society* dalam proses demokrasi? Jika gambaran yang muncul tersebut tampak buram, adakah hal itu memang disebabkan oleh lemahnya peran mereka, atau karena alat tera yang dipakai menakarya tidak cukup akurat? Adakah instrument yang lebih sesuai untuk menganalisis dan memahami relasi aktivisme *civil society* dan signifikansi peran mereka terhadap tumbuhnya demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan iatas adalah tali yang mengikat rangkaian paparan dalam penjelasan ini. paparan yang tersaji tidak dimaksudkan untuk menolak kelemahan-kelemahan *civil society* yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Argumentasi yang disampaikan lebih bertujuan untuk menawarkan sudut pandang alternative dalam memahami aktivisme *civil society* dan pengaruhnya terhadap demokrasi.¹⁷

Gerakan sosial merupakan bentuk aktivisme *civil society* yangnya sebagai khas(Diani dan Bison,2004). Sebagai bentuk aktivisme yang khas, Diani dan Bison mendefinisikan sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konflikual

¹⁷ DEMOS.2005.Menjadikan Demokrasi bermakna:masalah dan pilihan di Indonesia. Jakarta:Demos hal 139

yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Dalam definisi tersebut, gerakan sosial tidak hanya melibatkan aksi kolektif terhadap suatu masalah bersama namun juga dengan jelas mengidentifikasi target aksi tersebut dan mengartikulasikannya dalam konteks sosial maupun politik tertentu. Aksi kolektif bisa berasosiasi dengan gerakan sosial selama dianggap sebagai perlawanan terhadap perilaku atau legitimasi aktor politik maupun sosial tertentu dan tidak ditujukan bagi masalah-masalah yang tidak disebabkan secara langsung oleh manusia.

Gerakan sosial juga tidak bisa di representasikan oleh satu organisasi tertentu. Sebagai sebuah proses, gerakan sosial melibatkan pertukaran sumber daya yang berkesinambungan bagi pencapaian tujuan bersama diantara beragam aktor individu maupun kelembagaan mandiri. Strategi, koordinasi dan pengaturan peran dalam aksi kolektif ditentukan dari negosiasi yang terus-menerus dilakukan diantara aktor-aktor yang mandiri tersebut. Gerakan sosial menjadi khas karena aktor-aktor yang terlibat diikat oleh identitas kolektif yang dibangun diatas dasar kebutuhan kesadaran akan keterhubungan. Ciri-ciri tersebutlah yang membedakan gerakan sosial dengan bentuk-bentuk aksi kolektif lain.¹⁸

¹⁸ Fakih.M,1996.Masyarakat Sipil untuk Transformasi sosial:Pergolakan IdeologiLSM Indonesia.Yogyakarta:Pustaka pelajar hal 61

Sebagaimana yang disampaikan oleh Habermas bahwa gerakan sosial adalah “ruang antara” (*intermediary space*) yang menjembatani *civil society* dan Negara. Melalui ruang tersebut gerakan sosial mampu mempolitisasi *civil society* tanpa harus mereproduksi kontrol, regulasi dan intervensi seperti yang dilakukan oleh Negara. Politisasi dalam ruang antara itu telah memungkinkan gerakan sosial untuk menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat secara keseluruhan dan kepada aktor politik diluar *civil society*. Tidak mengherankan jika gerakan sosial ditengarai sebagai sumber harapan (*resource of hope*) bagi revitalisasi demokrasi menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, yaitu suatu tatanan masyarakat yang lebih banyak didominasi oleh *social forces* dari pada *social classes*. Dikarenakan gerakan sosial juga merupakan sebuah wadah bagi pengorganisasian, pemberdayaan, dan mobilisasi bagi kaum yang tertindas untuk melawan serta menjadi wahana bagi perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

Aktifitas gerakan demokrasi dinegara-negara *pasca-kolonial* mengalami perubahan isu dan metode. Perubahan ini ikut mempengaruhi corak pengetahuan dan epistemologi gerakan yang dipakai. Pada masa perang dunia I hingga berakhirnya perang dunia II, pergerakan politik mewujud dalam bentuk partai politik beserta seluruh sayap gerakannya. Secara konsepsi, pisau analisa bercorak marxisme-leninisme mendominasi cara pandang. Pertarungan merebut struktur politik kekuasaan dengan mengandalkan gerakan massa buruh-tani revolusioner adalah ciri khas fase ini.

Sejak perang dingin dimulai(1948), kecenderungan perubahan pilihan-pilihan metode gerakan mulai tampak. Dari pola-pola internasionalisme tunggal, menjadi faksi-faksi berpola federatif. Mereka yang menganut garis sosialisme-komunisme internasional, berubah menjadi nasionalisme kiri. Ini adalah bentuk otokritik dari makin ekstrim dan otoriternya kutub-kutub politik dunia. Puncaknya, saat periode 1960-an, gerakan yang mengusung tema-tema identitas muncul secara massif. Gerakan perempuan, masyarakat adat, hak-hak konsumen, gerakan anti-perang, gerakan lingkungan hidup, menjadi pengimbang corak gerakan buruh dan tani. Optik teori-teori *neo-marxisme* dan *postmodernisme*, menjadi bahan membuat analisa memandu gerakan.¹⁹

Perubahan gerakan di level global ini, tidak secara langsung mempengaruhi pola didalam negeri. Saat aktifitas gerakan demokrasi dunia mulai condong pada gerakan sosial, Indonesia sedang mengalami ketegangan politik formal terus-menerus, hingga mencapai puncaknya dalam tragedi 1965 dan turunnya Soekarno tahun 1966. Saat Soeharto mulai berkuasa, negara dijalankan dengan sangat represif dan otoriter.

Implikasi dari gerakan sosial cukup beraneka ragam bentuk. Tetapi pada dasarnya adalah mendorong adanya sebuah perubahan sosial. Gerak sosial ini berjalan dengan rentang waktu yang cukup lama. Tidak akan bergerak begitu saja dan spontan. Dengan demikian unsur yang penting dalam mengelola sebagai gerakan sosial adalah bertahannya sebuah isu yang diyakini merupakan musuh bersama, kuatnya sebuah organisasi yang mengusung isu tersebut dan tentu saja

¹⁹ Ibid hal 68

adalah kuatnya logistik untuk menghidupkan organisasi. Dengan demikian jelas bahwa gerakan sosial yang berkembang saat ini tidak akan mampu bertahan lama apabila tidak mengakar pada anggota organisasinya. Jadi isu yang terus-menerus menjadi kepingin bersama dapat menguatkan organisasi dan mendorong sebuah pergerakan yang merubah. Banyak contoh yang telah dikemukakan.²⁰

B. Pembebasan dalam Arti Gerakan Mahasiswa

Perjuangan menegakkan hak-hak asasi di negeri kita adalah hal yang amat wajar sebagai kewajiban kita semua, hal ini disebabkan oleh tuntutan dari nilai-nilai falsafah kenegaraan kita yang juga merupakan way of life dari bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang mana semua sila di dalamnya melahirkan kewajiban bagi kita untuk senantiasa berusaha menegakkan hak-hak asasi, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selama ini yang santer terdengar teriakan yang selalu membela kepada hak-hak rakyat tak lain adalah dari kaum mahasiswa. Edward Shill mengkategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas. Shill menyebutkan ada lima fungsi kaum intelektual yakni mencipta dan menyebarkan kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. Arbi Sanit memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam tiga fungsi terakhir. Sementara itu Samuel Huntington

²⁰ Ibid hal 107

menyebutkan bahwa kaum intelektual di perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi.²¹

Dalam perkembangannya Arbi Sanit mengemukakan ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.²²

Berbagai Gerakan mahasiswa juga merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok. Rudolf Heberle menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru. Bahkan Eric Hoffer menilai bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan. Teori awal menyebutkan, sebuah

²¹ Arief Budiman, *Peranan mahasiswa sebagai Inteligensia dalam Cendekiawan dan Politik*, Jakarta, LP3ES, 2005.

²² Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1984. Hal 58

gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelse. Teori kemacetan ini berpendapat bahwa “pengaturan lagi struktural dalam masyarakat seperti urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan meningkatkan “gelombang menuju perilaku antisosial”. Kemacetan sistemik ini dikatakan menjadi penyebab meningkatnya aksi mogok, kekerasan kolektif dan gerakan sosial dan mahasiswa Pakar kontemporer tentang gerakan sosial mengkritik teori-teori kemacetan dengan alasan empirik dan teoritis.

Sedangkan menurut Denny JA juga menyatakan adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa. Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintahan yang moderat, misalnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, misalnya dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan kemudian meluasnya gerakan sosial. Ketiga, gerakan sosial semata-masa masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan. Gerakan mahasiswa

mengaktualisasikan potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ideal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya.²³

Gerakan moral ini diakui pula oleh Arief Budiman yang menilai sebenarnya sikap moral mahasiswa lahir dari karakteristiknya mereka sendiri. Mahasiswa, sering menekankan peranannya sebagai “kekuatan moral” dan bukannya “kekuatan politik”. Aksi protes yang dilancarkan mahasiswa berupa demonstrasi di jalan dinilai juga sebagai sebuah kekuatan moral karena mahasiswa bertindak tidak seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis. Arief Budiman juga menambahkan, konsep gerakan moral bagi gerakan mahasiswa pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menganggap gerakan mahasiswa hanyalah merupakan kekuatan pendobrak, ketika terjadi kemacetan dalam sistem politik. Setelah pendobrakan dilakukan maka adalah tugas kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam hal ini partai-partai atau organisasi politik yang lebih mapan yang melakukan pembenahan.

Arbi Sanit menyatakan komitmen mahasiswa yang masih murni terhadap moral berdasarkan pergulatan keseharian mereka dalam mencari dan menemukan kebenaran lewat ilmu pengetahuan yang digeluti adalah sadar politik mahasiswa. Karena itu politik mahasiswa digolongkan sebagai kekuatan moral. Kemurnian

²³Arief Budiman, *Catatan Kritis Mencoba Memahami Si Bintang Lapangan 1998* hal 37

sikap dan tingkah laku ,mahasiswa menyebabkan mereka dikategorikan sebagai kekuatan moral, yang dengan sendirinya memerankan politik moral.

Namun seperti halnya gerakan sosial umumnya senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun ke jalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana. Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut.

Bentuk lain dari aktualisasi peran gerakan mahasiswa ini dilakukan dengan menurunkan massa mahasiswa dalam jumlah besar dan serentak. Kemudian mahasiswa ini mendorong desakan reformasi politiknya melakukan pendudukan atas bangunan pemerintah dan menyerukan pemboikotan. Untuk mencapai cita-cita moral politik mahasiswa ini maka muncul berbagai bentuk aksi seperti umumnya terjadi dalam, gerakan sosial. Arbi Sanit menyatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa fungsinya sebagai penguat tuntutan bukan sebagai kekuatan

pendobrak penguasa. Strategi demonstrasi diluar kampus merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat massa mahasiswa.²⁴

Arbi Santi menyebutkan, reformasi politik mahasiswa terfokus kepada suksesi kepemimpinan, penegakan pemerintahan yang kuat-efektif sehingga produktif, penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijakan puiblik yang adil dan tepat dan demokratisasi politik. Arbi menyajikan sebuah analisa sistematis mengenai peran strategis pembaharuan mahasiswa Asia dalam dekade 1990-an. Namun sayang, gerakan moral mahasiswa ini seringkali menimbulkan kerusuhan dan tindakan anarki, untuk itulah diperlukan strategi baru dalam melakukan aksi untuk menuntut perubahan kebijakan, yakni dengan menggunakan strategi negosiasi.

C. Sejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Sebenarnya gerakan mahasiswa tidak hanya terjadi pada masa presiden SBY saja sejak zaman Presiden soekarno gerakan mahasiswa sudah banyak bermunculan dan berikut sepenggal rekam jejak dari pergolakan mahasiswa dari pasca orde lama dan disarikan dari hasil wawancara dengan beberapa informan:

a. Gerakan Mahasiswa Awal terbentuknya Orde Baru

Pada awal terbentuknya Orde Baru, mahasiswa merupakan sekutu Angkatan Darat dalam proses transisi kekuasaan politik nasional. Implementasi strategi Angkatan Darat guna menghadapi Partai Komunis Indonesia diwujudkan dengan merangkul kelompok aktivis mahasiswa antikomunis ke dalam pengaruh

²⁴ Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan*, Jakarta, LP3ES, 2005, hal. 16.

mereka dan berdirilah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Mahasiswa antikomunis ini juga tengah menghadapi masalah akibat agresivitas organ-organ prokomunis atau pro Sukarno seperti Concentration Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kesamaan common enemy yaitu Partai Komunis Indonesia inilah yang kemudian memperlancar terjalinnya aliansi taktis Angkatan Darat dengan KAMI.

Pasca penemuan jenazah para perwira Angkatan Darat di sumur tua Lubang Buaya, Mayor Jenderal Syarif Thayeb (Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) mengumpulkan tokoh-tokoh organisasi mahasiswa anti komunis di rumahnya tanggal 25 Oktober 1965. melalui mediasi Thayeb, Angkatan Darat tampaknya ingin memanfaatkan konflik ideologis antar organisasi mahasiswa untuk kepentingannya sendiri: Menghantam PKI, dan selanjutnya mengkondisikan peralihan kekuasaan dari Sukarno ke tangan mereka.²⁵

Thayeb mengusulkan dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan usul ini disetujui para tokoh mahasiswa. Berdirinya KAMI mereduksi signifikansi peran PPMI, federasi mahasiswa terdahulu yang ditinggalkan organ-organ mahasiswa pembentuknya akibat banyak anasir komunis yang masuk ke sana. Anasir komunis yang paling berpengaruh adalah CGMI, yang bersama-sama dengan GMNI, GERMINDO, dan PERHIMI, aktif melakukan manuver politik antiimperialis Barat di tubuh PPMI. Namun, Angkatan Darat tidak akan mudah mengkooptasi organ-organ mahasiswa jika momentum juga tidak tersedia. Devaluasi mata uang, membumbungnya harga

²⁵ Data dokumentasi arsip sekolah analisis sosial LDF Surabaya

bahan pokok dan bahan bakar, langka dan mahal nya buku-buku teks, kesemrawutan suasana belajar, tentu mengganggu mahasiswa yang kepentingan ‘utamanya’ adalah belajar. Selain itu, ‘chauvinisme’ GMNI dan CGMI berupa tuntutan pemecatan dosen liberal dan staf pengajar asing (Barat) membuat mekanisme perkuliahan di kampus-kampus tidak lagi berjalan lancar.

Protes-protes mahasiswa mulai berangsur surut saat konsolidasi awal peralihan kekuasaan politik nasional dari Sukarno ke Soeharto. Sebagai sekutu Angkatan Darat yang dianggap loyal, beberapa tokoh mahasiswa kemudian diintegrasikan ke dalam struktur politik pusat. Tokoh-tokoh KAMI seperti Fahmi Idris, Johnny Simandjuntak, David Napitupulu, Mar’ie Muhammad, Liem Bian Koen, Soegeng Sarjadi, Nono Anwar Makarim, Yozar Anwar, Cosmas Batubara, masuk parlemen.

Namun, masuknya sejumlah aktivis mahasiswa ini mengundang kritik dari sesama mereka. Rahman Tolleng yang secara ideologis dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) menyatakan bahwa mereka “sudah menjadi politisi-politisi tulen, bukan lagi intelegensia yang berjiwa bebas dan merdeka.” Meskipun mengkritik, Rahman Tolleng pun akhirnya masuk ke DPRGR, bersama-sama dengan Hatta Mustafa, Slamet Sukirnantono, Liem Bian Koen, Cosmas Batubara, Nono Anwar Makarim, Zamroni, Johnny Simandjuntak, Harijadi Darmawan, Jacob Tobing, Mar’ie Muhammad, Rohali Sani, Salam Sumangat, dan David Napitupulu, melalui perombakan struktur parlemen bulan Pebruari 1968. Masuk atau tidaknya seorang mahasiswa ke dalam struktur kekuasaan merupakan pilihan

politik, dan mulai titik ini, gerakan sosial mahasiswa terlembaga dan harus berkompromi dengan kepentingan politik bernuansa pragmatis.

Eksistensi KAMI yang berangsur-angsur surut dapat dipahami oleh sebab secara genealogis, ia bukan merupakan suatu organisasi kemahasiswaan organis seperti PPMI atau MMI, oleh sebab dasar pembentukannya sekedar aliansi taktis yang dibangun Angkatan Darat untuk melakukan counteraction atas agresivitas komunis. Hubungan harmonis mahasiswa-militer (pemerintah) tidak berlangsung lama. Minimal sejak tahun 1971, aksi-aksi kritik terhadap penyelenggara baru negara mulai dilancarkan, terutama oleh generasi baru mahasiswa. Fokus kritik bukan ditujukan terhadap personalitas kekuasaan melainkan strategi pembangunan yang diambil. Masalah korupsi Pertamina, pemborosan dana negara lewat pembangunan Taman Mini, gerakan anti korupsi, serta pembentukan komite-komite aksi yang menginstruksikan penghematan uang negara dan rasionalitas strategi pembangunan, banyak dibentuk mahasiswa. 'Kegelisahan' mahasiswa ini juga diwarnai konflik dua kelompok kepentingan di tingkat pusat.

Eksplosi konflik antara kelompok pemerintah dan mahasiswa berlangsung dalam apa yang kemudian dikenal khalayak sebagai Peristiwa Malari 1974. Setelah mengunjungi Hariman Siregar di penjara, Sumitro mendapat informasi bahwa Ali Moertopo berada di belakang pengerahan preman untuk melakukan sejumlah tindak perusakan di Segitiga Senen. Epilog dari peristiwa tersebut adalah pengangkatan Ali Moertopo sebagai Menteri Penerangan (bukan Kabakin) dan pembebastugasan Sumitro dari jabatan Pangkopkamtib, jabatan yang kemudian diserahkan kepada Laksamana Sudomo, simpatisan Soeharto.

Dalam dunia kemahasiswaan, epilog Peristiwa Malari adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.028/U/1974, surat yang ironisnya ditandatangani promotor berdirinya KAMI, Sjarif Thajeb, pada tanggal 3 Januari 1974. Dalam lampirannya, surat keputusan yang dikenal sebagai SK 028, melimpahkan kewenangan yang begitu besar kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengatur kegiatan para mahasiswa. SK 028 juga mengindikasikan mulai terciptanya jurang posisi antara pemerintah Orde Baru dengan mahasiswa. ‘Penjinakan’ pemerintah terhadap aktivisme mahasiswa sesungguhnya telah dimulai sejak tahun sebelumnya, yaitu saat dibentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tanggal 23 Juli 1973. gagasan pembentukan komite ini diajukan Jenderal Ali Moertopo yang dioperasionalkan oleh tokoh-tokoh mahasiswa 1966 yang ‘terserap’ ke dalam struktur kekuasaan seperti David Napitupulu, Akbar Tanjung, dan Abdul Gafur. Keputusan pendirian KNPI ini sebagai reaksi atas terbentuknya Kelompok Cipayung pada tanggal 9 Oktober 1972, kelompok yang pernah mendirikan organ mahasiswa sekaliber PPMI, organ federasi mahasiswa yang memiliki ideologi spesifik sekaligus memiliki ‘jam terbang’ politik yang cukup tinggi, di samping jumlah massa yang juga besar.

Pasca terbitnya SK 028, protes-protes mahasiswa dalam pertengahan dekade 1970-an lebih banyak diarahkan atas keputusan pemerintah tersebut. Arbi Sanit mencatat bahwa tidak semua rektor perguruan tinggi melaksanakan aturan SK 028 secara ketat, misalnya Mahar Mardjono dari Universitas Indonesia yang tetap memperbolehkan aksi bernuansa politik di dalam kampus, bahkan mentolelir

pemberitahuan aksi mendadak yang akan dilakukan para mahasiswa. Selain SK 028, masalah-masalah normatif seperti korupsi pejabat, ketimpangan pendapatan, dan pemerataan hasil pembangunan tetap menjadi fokus kritik mahasiswa. Meskipun mulai banyak mendapat kritik mahasiswa, pemerintah Orde Baru justru mengalami sejumlah 'keberhasilan' di sektor ekonomi, yang salah satunya diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia.

Dalam menyikapi masalah seputar pengelolaan kesejahteraan masyarakat dan keuangan negara, mahasiswa mulai menggalang serangkaian aksi protes. Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang dimotori oleh organisasi 'eks PPMI' dan hubungan cukup akrab dengan 'tentara' aksi-aksi pasca SK 028 berilusiikan independensi dan eksklusivitas mahasiswa sebagai suatu kelompok sosial khusus.

Pada sisi vertikal, suhu politik Indonesia mulai dinamis menjelang Pemilu 1977 dan pemilihan presiden 1978. Sementara itu pada sisi horizontal, di Jakarta terjadi kenaikan tarif bus kota, di Surabaya terjadi penggusuran pedagang kaki lima, dan di Bogor terjadi banyak penguasaan tanah masyarakat oleh pejabat. Pasca pelaksanaan Pemilu 1977 (yang tentu saja dimenangkan Golkar), salah satu respon atas pergolakan di daerah dilakukan oleh Dewan-dewan Mahasiswa/Senat-senat Mahasiswa (DM/SM) se-Bandung melalui Gerakan Anti Kebodohan (GAK). Para mahasiswa organisasi intra kampus ini mengkomunikasikan 'proses pembodohan' yang dilakukan negara terhadap masyarakat kepada para pimpinan partai politik di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1977. Kaskopkamtib Laksamana Sudomo menganggap bahwa GAK ini 'ditunggangi.'

Akumulasi protes atas kondisi obyektif mengerucut pada personalitas kekuasaan, Soeharto. Pada tanggal 18 Januari 1978, lima dewan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Sumatera Utara menerobos masuk ke kediaman Presiden dan menyerahkan surat yang isinya menuntut agar Soeharto tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden RI untuk periode ke-3, oleh sebab “bila terpilih kembali maka akan terulang peristiwa penggulingan pemerintah seperti yang terjadi pada saat-saat terakhir almarhum Presiden Sukarno”. Pernyataan tersebut memunculkan sikap yang sesungguhnya dari pemerintah atas protes para mahasiswa. Pemerintah sesungguhnya telah bersiaga, terutama sejak dikeluarkannya Pernyataan Sikap Mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada tanggal 14 Januari 1978 yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB Heri Akhmadi yang menyatakan “tidak mempercayai dan tidak menginginkan Soeharto kembali sebagai Presiden RI”. Meskipun digerakan oleh lembaga intra kampus, protes-protes mahasiswa 1978 mengindikasikan gerakan politik yang high profile sebab tertuju langsung pada pimpinan ‘kunci’ negara.

Reaksi pemerintah atas gerakan ini cukup keras, baik melalui instrumen fisik maupun kebijakan. Pada tanggal 21 Januari 1978 Laksamana Sudomo melalui Surat keputusan Pangkoptamtib bernomor SKEP/02/KOPKAM/I/1978 membekukan kegiatan dewan-dewan mahasiswa universitas/perguruan tinggi/institut. Tindakan ini disertai serangkaian pendudukan kampus (misalnya 25 Pebruari 1978 kampus Universitas Gadjah Mada jatuh ke tangan tentara), penangkapan atas pemimpinnya, pembreidelan surat kabar umum dan mahasiswa,

serta tindak pengucilan pemerintah atas empat jenderal yaitu H.R. Dharsono, Kemal Idris, Ali Sadikin, dan Abdul Haris Nasution yang dianggap memprovokasi protes mahasiswa sepanjang tahun 1977-1978.

b. Normalisasi Kehidupan Kampus

Pada satu sisi, kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) secara parsial dapat dikatakan sebagai reaksi pemerintah atas gerakan mahasiswa 1978 yang mulai mempersoalkan eksistensi Soeharto. Dengan terbitnya NKK, maka posisi diametral mahasiswa terhadap personalitas Presiden Soeharto dan angkatan bersenjata pun dimulai. Pada sisi lain, NKK masuk ke dalam wacana ideologi pembangunan Orde Baru atau tepatnya berposisi sebagai instrumen pengontrol daya protes gerakan sosial mahasiswa. NKK menjadi salah satu dari sekian banyak instrumen politik lain seperti Paket 5 UU Politik 1985 guna menjamin stabilitas politik nasional dan posisi presiden. NKK diawali dengan pembekuan atas Dewan-dewan Mahasiswa seluruh Indonesia oleh Panglima Komando Ketertiban dan Keamanan (Pangkopkamtib) Sudomo (pengganti Sumitro),

Pernyataan sikap ditandatangani oleh Sudomo atas nama Pangkopkamtib menilai bahwa tindakan para mahasiswa tersebut telah “merongrong” wibawa pemerintah, menimbulkan rasa benci, perpecahan, pertentangan, yang jika terus dibiarkan akan berimbas pada kekacauan di tengah masyarakat. Partisipasi politik mahasiswa itu juga diklasifikasikan pihak Pangkopkamtib menjurus kepada tindakan “subversi.” Dalam butir ke-21 penjelasan Pangkopkamtib mengenai sikap mereka atas gerakan mahasiswa 1978, dicapai keputusan untuk

“membekukan kegiatan Dewan Mahasiswa semua universitas/ perguruan tinggi/institut.”

‘Kekerasan’ politik ini tidak hanya diberlakukan kepada mahasiswa, tetapi juga atas pers dengan melarang terbit secara temporer sejumlah kegiatan percetakan, penerbitan, dan pengedaran surat kabar ataupun harian-harian Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, dan Sinar Pagi, sebab dinilai telah ikut ‘memanaskan’ situasi di sela-sela penyelenggaraan Sidang Umum MPR tahun 1978. Keputusan pembekuan Dewan Mahasiswa ini kemudian diikuti keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Muhtar E. Harahap dan Andris Basril mengemukakan bahwa pada “.... intinya NKK menjustifikasi pembubaran dan dihilangkannya organisasi mahasiswa yang selama ini merupakan sarana demokratis mahasiswa [dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah].” Ulf Sundhaussen bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai “a policy designed to keep the students of streets and politically compliant.”

Khusus guna menjelaskan maksud pemerintah atas pemberlakuan kebijakan NKK tersebut, Daoed Joesoef, setelah tidak lagi menjabat sebagai Mendikbud dan aktif di Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dalam kebijakan NKK, politik dibedakan ke dalam tiga pengertian yaitu politik dalam arti konsep (concept), dalam arti kebijakan (policy), dan dalam arti arena percaturan (politics). Politik dalam arti konsep berarti mengajukan gagasan, pikiran, interpretasi mengenai apa yang dianggap sebagai kepentingan publik. Pengajuan gagasan ini lengkap dengan pencantuman program aksi dan tujuan

yang hendak dicapai melalui program tersebut serta bagaimana cara yang dipakai. Dalam rasionalisasinya atas NKK, pemerintah berkeinginan melatih mahasiswa untuk berpikir konseptual-teoritik dan sistematis. Politik dalam artian policy mengeksplisitkan bentuk-bentuk tindakan nyata individu atas masalah masyarakat ataupun negara. Sementara politik dalam artian ketiga, yaitu sebagai arena, merupakan media di mana masing-masing individu atau kelompok yang punya konsep dan kebijakan, saling bertarung satu sama lain, di mana masing-masingnya memiliki sasaran, kepentingan, ide, bahkan ideologinya sendiri-sendiri.

Dari tiga arti politik yang dimaksudkan pemerintah ini, maka satu-satunya pengertian yang boleh diterapkan mahasiswa hanya dalam arti pertama, yaitu 'konsep.' Hak politik yang diberikan kepada mahasiswa sebab itu hanyalah memperbincangkan masalah politik dalam lingkup 'tembok' kampus dan tidak untuk dioperasionalkan ke masyarakat, apalagi membangun gerakan dalam bentuk protes demonstratif. Mengenai penetapan ini, Daoed Joesoef menjelaskan bahwa NKK tidak ingin mahasiswa buta politik. Justru saya tekankan. Ada tiga artian politik. Pertama, politik dalam artian konsep. Kedua, politik dalam artian kebijakan. Ketiga, politik dalam artian arena. Nah, yang dikembangkan dalam NKK, adalah politik dalam artian konsep. Mahasiswa harus menyiapkan diri untuk mampu membuat konsep. Kebijakan NKK yang merupakan kesinambungan dari keputusan pembekuan Dewan Mahasiswa, lalu juga diikuti dengan pembentukan Badan Koordinasi Kampus (BKK) sebagai operasionalisasinya. Dengan bekunya Dewan Mahasiswa, maka perangkat yang menjadi wahana aktivitas mahasiswa menjadi tidak ada lagi, dan digantikan BKK.

Melalui Surat Keputusan Mendikbud No.037/U/1979 dikeluarkan pengaturan tentang “Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan” yang diikuti pula oleh penjelasan teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.002/Dj/Inst/1978 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Sesuai dengan alur kebijakan lanjutan dari NKK ini, maka pembentukan organisasi kemahasiswaan yang diizinkan berdiri hanyalah Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), dimana penunjukan terhadap para mahasiswa yang nantinya duduk di kedua organisasi tersebut secara dominan dipengaruhi oleh rektorat, sebagai lembaga yang didelegasikan kewenangannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wewenang yang diberikan terhadap rektorat tersebut menjadikan rektor dan pembantu-pembantu rektor sebagai ‘penguasa’ tertinggi dan berdaulat di dalam kampus.

Petunjuk teknis sekitar mekanisme pengangkatan pengurus organisasi mahasiswa, dikeluarkan melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi No.002/DK/Ins/1978, yang saat itu dijabat Dodi Tisnaamidjaja, di mana:

- Lembaga BKK yang dibentuk di tingkat universitas/institut diketuai oleh Pembantu Rektor III dengan beranggotakan Pembantu Dekan III, beserta staf ahli yang terdiri dari dosen-dosen pembimbing, dan juga tokoh-tokoh mahasiswa yang dianggap mengetahui seluk-beluk kemahasiswaan di perguruan tinggi bersangkutan.

- BKK membentuk unit-unit kegiatan kemahasiswaan (UKM) dalam bidang-bidang kesejahteraan, minat dan perhatian mahasiswa serta pengembangan penalaran mahasiswa.
- Ketua dan Sekretaris (dari BKK) diangkat dengan Surat Keputusan Rektor.
- Ketua dan Sekretariat unit-unit kegiatan mahasiswa diangkat oleh Ketua BKK dengan persetujuan Rektor.

Ketentuan seperti di atas menciptakan korporatisasi negara terhadap mahasiswa (via rektorat) sehingga sulit bagi aktivis mahasiswa mengembangkan otonomisasi dan independensi keorganisasian. Seorang tokoh mahasiswa, sepopulis apapun dia, tetap tidak bisa duduk di lembaga kemahasiswaan intra kampus tanpa persetujuan Pembantu Dekan III. Di dalam 'spirit' NKK/BKK, mahasiswa dilarang melakukan 'politik praktis' di kampus dan ini meliputi jenis-jenis partisipasi politik seperti diskusi. Diskusi politik yang diizinkan pun hanya sebatas wacana, tetapi tidak untuk diimplementasikan ke dalam aksi-aksi politik seperti demonstrasi yang berkenaan dengan masalah politik. Pengorganisasian mahasiswa yang dianjurkan justru yang bersifat nonpolitis seperti olahraga, pecinta alam, seni, ataupun beladiri.

Depolitisasi mahasiswa semakin efektif dengan pemberlakuan Sistem Kredit Semester (SKS) yang membatasi waktu studi mahasiswa hingga misalnya untuk mahasiswa Strata I adalah selama tujuh tahun. Dengan SKS ini maka mahasiswa tidak dapat lagi mengambil 'cuti panjang' untuk terlibat dalam kegiatan politik seperti di masa Dewan Mahasiswa, oleh sebab masa cuti di bawah

SKS termasuk ke dalam batas waktu maksimal studi yang tujuh tahun itu. Selain SKS, penyitaan waktu mahasiswa hanya untuk belajar juga diindikasikan oleh sistem Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), di mana kumulasi SKS yang ditempuh seorang mahasiswa amat mempengaruhi perizinan atasnya untuk menempuh mata kuliah tertentu atau menulis proposal skripsi. Jika pun organisasi-organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kemudian akan dipilih sebagai alternatif partisipasi mahasiswa aktivis, tetapi organisasi-organisasi tersebut telah ‘dikorporatisasi’ negara ke dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana pembinaan terhadap mereka bukan dilakukan oleh pihak kampus melainkan oleh kementerian lain. Menurut logika NKK/BKK, seperti yang tercantum didalam penjelasan Daoed Joesoef, maka ketika seorang mahasiswa bergabung kedalam ormas-ormas tersebut, status kemahasiswaan harus ditinggalkan menjadi pemuda.

Dalam implementasi NKK/BKK, kekuatan militer juga ikut andil di dalam melakukan penyeliaan (supervising). Gayatri menulis bahwa “pada setiap Korem, seorang petugas secara khusus ditempatkan di dalam universitas-universitas, dan secara langsung menerima laporan, bahkan lewat telepon, melalui wakil Rektor atau Pembantu Rektor III pada setiap kegiatan mahasiswa yang ada di lingkup wewenangnya.” Di tingkat dunia kemahasiswaan, kebijakan korporatis ini memunculkan pola-pola penyikapan yang beragam di kalangan mahasiswa pada periode 1980-an ke dalam empat kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah apatis, yang muncul karena mahasiswa menganggap terlalu besar resiko jika

mereka aktif secara politik. Hal lain yang turut berpengaruh atas kecenderungan ini adalah ketatnya sistem pendidikan berpola Sistem Kredit Semester dan Sistem Indeks Prestasi Kumulatif. Kecenderungan kedua adalah kontemplatif, yang dilakukan mahasiswa guna menggali kembali pemikiran-pemikiran yang mendasar dalam konteks negara sambil mencari peluang-peluang yang dapat diambil. Mereka ini mengalami kebimbangan atas pilihan apakah akan melakukan aktivitas yang nyata dan konkret, atau terus berkontemplasi. Kecenderungan ketiga adalah partisipatif yaitu mahasiswa terjun langsung ke dalam masalah-masalah kemasyarakatan, dan ini memperlihatkan signifikansi di kota-kota nonibukota seperti Bandung dan Yogyakarta. Kecenderungan ini melahirkan konsep aktivis mahasiswa 'Agropolitan', yaitu aktivis mahasiswa yang bergiat dalam isu-isu masyarakat lokal. Kecenderungan keempat adalah oportunistik, pola sikap mahasiswa yang semata-mata pergi ke kampus untuk belajar, mencari karir, dan tidak 'ambil pusing' terhadap masalah politik. Pola sikap mahasiswa jenis ini biasanya mencari jalur untuk meningkatkan karir politik melalui cara-cara yang menyenangkan penguasa.

Di dalam dekade 1980-an, kecenderungan utama mahasiswa adalah apatis dan oportunistik. Resiko politik jika menunjukkan kritik atas personalitas kekuasaan cukup berat. Namun, seketat apapun pengendalian mahasiswa, pada tahun 1980-an terjadi juga aksi long march 10.000 mahasiswa guna memprotes pemberlakuan NKK/BKK terhadap kampus mereka. Di dalam aksi ini mereka bergerak dari kampus Universitas Indonesia di Salemba, melalui Kuningan, menuju ke Senayan, guna 'menegosiasikan' kebijakan tersebut kepada wakil

rakyat di parlemen. Fenomena NKK/BKK ini menggelisahkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga sebagian kalangan intelektual semisal Mochtar Lubis. Pemberlakuan konsep NKK/BKK dinilainya telah membuat mahasiswa menjadi tidak kritis lagi terhadap proses sosial dan politik, baik di level negara maupun masyarakat.

Student Government dengan cara apapun perlu sekali dibentuk. Tapi selama mahasiswa masih terkait dengan struktur formal di dalam suatu universitas, maka selama itu pula Student Government sulit berjalan. Otonomi berpikir mahasiswa semakin hilang karena setiap gerakan mahasiswa yang dianggap agak kritis ditolak oleh Purek dan Pudek. Sekarang dianggap tidak ada apa-apa lagi. sekarang Pudek masuk dalam struktur senat tersebut, karenanya senat tidak bisa berbuat banyak. Pernyataan Aly ini menggambarkan bagaimana kehidupan kampus, terutama kegiatan mahasiswa yang kritis, sulit untuk diimplementasikan oleh sebab sebelum hal tersebut diwujudkan, 'sensor' birokrasi kampus terlebih dahulu menghambat. Apatisme dan oportunisme menurut istilah Adi Sasono yang berkembang di kalangan mahasiswa mungkin dapat diwakili oleh pernyataan berikut "Wah, sekarang repot untuk melakukan kegiatan mahasiswa. Nanti kita tidak bisa tamat. Apa artinya sekarang menjadi tokoh mahasiswa tapi akhirnya kita tidak bisa masuk menjadi pegawai Departemen PU, masuk dalam aparat pemerintahan."

Guna menggambarkan situasi penyelenggaraan NKK/BKK yang mewakili pandangan pragmatis, dapat dimuat pendapat Sarlito Wirawan Sarwono. Menurutnya, zaman aktivisme 'jalanan' seperti pada periode '66, '74', dan '78

telah berakhir, dan mahasiswa secara pragmatis harus menerima situasi seperti ini dengan menyikapi 'ekses' kebijakan tersebut secara 'lebih bijaksana.' Bagi Sarwono. Dan tidak ada pula yang bisa mengklaim bahwa mahasiswa sekarang tidak sepeka mahasiswa tempo dulu. Keadaan sudah berubah, sehingga bentuk penyaluran rasa sosial pun otomatis telah berubah. Jika tempo dulu yang menonjol adalah gerakan politik yang mengarah ke struktur kekuasaan: demonstrasi, buat poster-poster. Sekarang lebih kemasalah kultural: membantu program Keluarga Berencana, misalnya. Secara jumlah pun tidak bisa dikatakan bahwa jumlah mahasiswa sekarang yang melibatkan diri dalam permasalahan sosial merosot. Jika kita teliti gejolak tahun '66, '72, '74, dan '78, mahasiswa yang terlibat pun sedikit. Ya, cuma dia-dia. Hanya saja karena sekarang ini dimitoskan, kesannya gerakan tahun tersebut] hebat dan ramai. Secara lebih jauh, jika pun mahasiswa ingin mengulang gerakan-gerakan seperti pada 'masa lalu', mereka tidak akan bisa oleh sebab dengan kebijakan NKK/BKK jalur-jalur hubungan historis antara senior-junior telah ditiadakan melalui penghapusan program Mapram atau Posma, di pihak lain pengkonsentrasian mahasiswa untuk hanya beraktivitas di dalam kampus membuat mereka semakin berjarak dengan massa rakyat, dan dengan kondisi-kondisi yang demikian, harapan untuk membangun gerakan 'jalanan' hanya bersifat romantik ketimbang realistik. Sarwono juga membantah bahwa gerakan mahasiswa di NKK/BKK cenderung menurun secara kualitatif oleh sebab dengan melihat pengalaman tiga gerakan sebelumnya, tokoh-tokoh mahasiswa yang terlibat sesungguhnya hanya terdiri atas orang-orang yang sama.

Namun, pendirian pragmatis seperti Sarlito ini dibantah oleh M. Dawam Raharjo, sebab menurutnya, NKK/BKK telah membuat berjaraknya hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat banyak. Bagi Dawam, posisi mahasiswa tetap sebagai agen perubahan masyarakat, dan sebagai agen ia harus tetap menjaga hubungan yang relatif dekat dengan orang-orang yang ingin gagasannya didengar oleh pemerintah ini, khususnya mengenai apa-apa yang mereka inginkan dari penyelenggara negara. Sebab itu, misi mahasiswa yang paling dekat di era 1980-an adalah “kesadaran politik melawan teknokrasi [yang dilakukan negara terhadap mereka.]”

Kecenderungan elitisme dari para mahasiswa di era NKK/BKK membuat fungsi mereka sebagai katalisator perubahan masyarakat menjadi sulit untuk dikembangkan. Namun, ada juga sementara kalangan yang menganggap bahwa proses elitisasi tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis dari pembangunan suatu masyarakat yang profesional, di mana Daoed Joesoef berpendapat, sebetulnya pendapat yang mengatakan bahwa kondisi mahasiswa sekarang [era NKK/BKK] suatu kelompok elitis mahasiswa yang tidak punya kepekaan politik adalah keliru. Dalam artian, pertama memang pendidikan harus menghasilkan elite. Kedua, kepekaan itu tidak berarti, jika ada masalah orang-orang berteriak dan turun ke jalan. Kepekaan dia sebagai intelektual. Dan intelektual tidak menjerit. Intelektual itu berpikir, dan menuliskan pikirannya.”

Pendapat Daoed Joesoef ini kiranya memperkuat logika NKK/BKK mengenai pengertian politik yang harus diinternalisasikan mahasiswa, di mana hal tersebut berupa pengertian politik sebagai konsep. Sebagai konsep, politik tidak

‘terlarang’ bagi mahasiswa oleh sebab ia hanya sebatas wacana dan bukan gerakan riil. Penjelasan Joesoef seperti di atas merupakan retorika yang kerap diajukan tatkala menghadapi tuduhan bahwa kebijakan NKK/BKK telah mendepolitisasi kehidupan kampus.

Berdasarkan data di atas, maka kondisi umum yang terjadi selama era NKK/BKK terhadap hubungan dunia mahasiswa dengan politik (dalam artian kedua dan ketiga menurut logika Daoed Joesoef seperti telah disebut) mencerminkan dua hal. Pertama, mereka kehilangan ruang politik yang bebas di dalam mengembangkan kritisisme dan kreativitas mereka di dalam menyikapi persoalan bangsa oleh sebab mereka hanya dibatasi pemahaman politiknya sebatas konsep. Kedua, organisasi konvensional yang selama ini diandalkan sebagai basis protes (senat mahasiswa dan organisasi mahasiswa ekstern) mengalami depolitisasi.

c. Tragedi kerusuhan Mei 1998

Kejatuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 membuat pemilihan pemerintahan Indonesia saat itu sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini supaya dapat keluar dari krisis ekonomi. Pada bulan Maret 1998 MPR saat itu walaupun ditentang oleh mahasiswa dan sebagian masyarakat tetap menetapkan Soeharto sebagai Presiden. Tentu saja ini membuat mahasiswa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis dengan menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden. Cuma ada jalan demonstrasi supaya suara mereka didengarkan.

Demonstrasi digulirkan sejak sebelum Sidang Umum (SU) MPR 1998 diadakan oleh mahasiswa Yogyakarta dan menjelang serta saat diselenggarakan SU MPR 1998 demonstrasi mahasiswa semakin menjadi-jadi di banyak kota di Indonesia termasuk Jakarta, sampai akhirnya berlanjut terus hingga bulan Mei 1998. Insiden besar pertama kali adalah pada tanggal 2 Mei 1998 di depan kampus IKIP Rawamangun Jakarta karena mahasiswa dihadang Brimob dan di Bogor karena mahasiswa non-IPB ditolak masuk ke dalam kampus IPB sehingga bentrok dengan aparat. Saat itu demonstrasi gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta merencanakan untuk secara serentak melakukan demonstrasi turun ke jalan di beberapa lokasi sekitar Jabotabek. Namun yang berhasil mencapai ke jalan hanya di Rawamangun dan di Bogor sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan puluhan mahasiswa luka dan masuk rumah sakit.

Setelah keadaan semakin panas dan hampir setiap hari ada demonstrasi tampaknya sikap Brimob dan militer semakin keras terhadap mahasiswa apalagi sejak mereka berani turun ke jalan. Pada tanggal 12 Mei 1998 ribuan mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu yang telah terpilih berulang kali sejak awal orde baru. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997. Mahasiswa bergerak dari Kampus Trisakti di Grogol menuju ke Gedung DPR/MPR di Slipi. Dihadang oleh aparat kepolisian mengharuskan mereka kembali ke kampus dan sore harinya terjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan itu berlangsung sepanjang sore hari dan

mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan puluhan orang lainnya baik mahasiswa dan masyarakat masuk rumah sakit karena terluka. Sepanjang malam tanggal 12 Mei 1998 hingga pagi hari, masyarakat mengamuk dan melakukan perusakan di daerah Grogol dan terus menyebar hingga ke seluruh kota Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat yang menembak mati mahasiswa.

Dalam keadaan yang mulai terkendali setelah mencekam selama beberapa hari sejak tertembaknya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia, tanggal 18 Mei 1998 hari Senin siang, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR/MPR dan dihadang oleh tentara yang bersenjata lengkap, bukan lagi aparat kepolisian. Tuntutan mereka yang utama adalah pengusutan penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan Soeharto sebagai Presiden kembali, pembubaran DPR/MPR 1998, pembentukan pemerintahan baru, dan pemulihan ekonomi secepatnya. Kedatangan ribuan mahasiswa ke gedung DPR/MPR saat itu begitu menegangkan dan nyaris terjadi insiden. Suatu saat tentara yang berada di depan gedung atas tangga sempat mengokang senjata mereka sehingga membuat panik para wartawan yang segera menyingkir dari arena demonstrasi. Mahasiswa ternyata tidak panik dan tidak terpancing untuk melarikan diri sehingga tentara tidak dapat memukul mundur mahasiswa dari gedung DPR/MPR. Akhirnya mahasiswa melakukan pembicaraan dengan pihak keamanan selanjutnya membubarkan diri pada sore hari dan pulang dengan menumpang bus umum.

Keesokan harinya mahasiswa yang mendatangi gedung DPR/MPR semakin banyak dan lebih dari itu mereka berhasil menginap dan menduduki gedung itu selama beberapa hari. Keberhasilan menduduki gedung DPR/MPR mengundang semakin banyaknya mahasiswa dari luar Jakarta untuk datang dan turut menginap di gedung tersebut. Mereka mau menunjukkan kalau reformasi itu bukan hanya milik Jakarta tapi milik semua orang Indonesia. Soeharto akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat yang menghendaki dia tidak menjadi Presiden lagi, namun tampaknya tak semudah itu reformasi dimenangkan oleh rakyat Indonesia karena ia meninggalkan kursi kepresidenan dengan menyerahkan secara sepihak tampuk kedaulatan rakyat begitu saja kepada Habibie. Ini mengundang perdebatan hukum dan penolakan dari masyarakat. Bahkan dengan tegas sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa Habibie bukan Presiden Indonesia. Mereka tetap bertahan di gedung DPR/MPR sampai akhirnya diserbu oleh tentara dan semua mahasiswa digusur dan diungsikan ke kampus-kampus terdekat. Paling banyak yang menampung mahasiswa pada saat evakuasi tersebut adalah kampus Atma Jaya Jakarta yang terletak di Semanggi.

D. Faktor-faktor timbulnya Gerakan Sosial

Dalam sejarah perlawanan dan kepatuhan kelas-kelas yang dikuasai atau tertindas, mereka sering kali digambarkan sebagai obyek yang seluruh aktivitasnya dibatasi oleh struktur-struktur yang membelenggu mereka. artinya, tidak ada tempat sama sekali bagi mereka untuk bertindak sebagai subyek yang memiliki otoritasnya sendiri. Padahal cukup terbukti bahwa keberadaan kelas-kelas yang

tertindas tersebut tidak selalu dalam posisi disejarahkan, tetapi mereka juga mampu membuat sejarah mereka sendiri.

Tulisan ini merupakan suatu usaha untuk menelaah perspektif-perspektif teoretis yang berkenaan dengan gerakan perlawanan sosial. Pertama-tama kita akan memfokuskan pada masalah seperti basis sosial dari kepatuhan dan perlawanan sosial, konflik kelas dan kesadaran kelas, dan yang terlahir tapi tak kurang pentingnya, bentuk-bentuk dari perlawanan sosial. Sementara literatur mengenai perlawanan sosial sangat berlimpah. Pokok telaah dalam tulisan ini adalah asumsi yang mendasarinya yakni, bahwa suatu mengenai perlawanan akan menganut tradisi dialektis yang memahamkan proses sosial sebagai interaksi kompleks antara aktor-aktor manusia dengan struktur sosial. Mengikuti Moore, E.P.Thompson, Giddens, Foucault, Scott dan lain-lain, tulisan ini akan membela pandangan yang menganggap bahwa orang tidak bisa mereduksi fenomena-fenomena sosial sekadar sebagai hubungan-hubungan produksi. Sebaliknya, manusia sebagai aktor-aktor sosial dalam menciptakan sistem-sistem signifikasi atau struktur-struktur makna serta menangani tingkah laku sosialnya sehari-hari. Itu sebabnya gagasan mengenai saling pengaruh dialektika antara hubungan produksi dan agen manusia menjadi sangat penting dipahami, dalam rangka menghindari pandangan sebelah mata atau sepihak mengenai realitas sosial.²⁶

Pertanyaan yang menggugah mengenai mengapa orang tunduk atau membangkang terhadap kekuasaan dan mengapa mereka menaggalkan kepatuhan mereka atau mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan, merupakan salah satu

²⁶ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hal.267.

pokok perdebatan sentral dalam literature mengenai perlawanan. Sekurangnya ada dua kecenderungan teoritis yang sampai sejauh ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertama berusaha menjelaskan fenomena kepatuhan dan perlawanan dari pandangan ,mengenai otoritas moral sebagai basis dari hubungan-hubungan sosial dan stabilitas sosial. Kedua, yang sebagian besar dianut oleh strukturalisme (baik dalam madzhab Marxis maupun non-Marxis), mendasarkan penjelasan pada adanya keharusan structural yang menentukan tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku individual, termasuk kepatuhan atau perlawanannya terhadap kekuasaan. Barrington Moore dalam bukunya *Injustice: the Social Bases of Obedience and Revolt* mewakili kecenderungan teoritis yang pertama, ia menjelaskan asal usul dari kepatuhan dan perlawanan sosial dari perspektif otoritas moral, studinya mengenai revolusi-revolusi di jerman dan rusia pada awal abad ke -20 merupakan upaya untuk memperlihatkan sebab-sebab dan akibat-akibat dari revolusi sosial dalam dua masyarakat yang berbeda itu, sebagian disebabkan karena kebiadaban moral di dalam masyarakat tersebut, dan bagaimana masyarakat itu mengarahkan kemarahannya menjadi suatu gerakan sosial. Sebaliknya Stanley Milgram dalam bukunya *Obedience of Authority* merupakan kecenderungan yang kedua, yang mengajukan jawaban bahwa kepatuhan dan perlawanan didasarkan pada rangsangan luar sebagai faktor utamanya²⁷.

Dua pendekatan ini telah menghasilkan jawaban-jawaban yang berbeda, kendatipun bukannya sama sekali tak bisa dipertemukan. Upaya-upaya telah

²⁷KH. Abdurrahman Wahid.2000.*Membangun Demokrasi*.Rosdakarya:bandung hal 29

banyak dilakukan untuk memadukan kedua penjelasan semacam itu, dan menyatukannya kembali. banyak penulis yang menganjurkan pendekatan yang kurang lebih bersifat dialektika, antara keharusan structural dan otoritas moral. Yang terpenting dari pendekatan ini adalah penolakannya terhadap adanya gagasan mekanistik di dalam kecenderungan subyektivitas didalam tesis otoritas moral.

Yang lainnya lagi beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang bisa disebut sebagai moralitas alamiah, yang sudah ada jauh sebelum adanya pengaruh sosial tetapi yang belum tentu kebal terhadapnya. Apa yang diartikan disini adalah bahwa “ beberapa preferensi moral tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari kebiasaan dan kondisi sosial” moralitas semacam ini sebaliknya memberikan dorongan bagi terjadinya perkembangan aturan-aturan moral, kemarahan moral, dan persepsi-persepsi mengenai ketidakadilan didalam setiap masyarakat, melalui moralitas jenis ini individu-individu bersepakat untuk menciptakan suatu kontrak sosial dan mengabsahkan formasi-formasi sosial yang sudah ada untuk dikembangkan. Dengan demikian sejauh menyangkut kepatuhan dan perlawanan sosial, maka hal itu akan tergantung pada kemampuan dari kekuasaan dan sistem sosial untuk memenuhi imperatif-imperatif moral yang sudah ada sebelumnya. Keberangan moral (*moral outrage*), oleh karena itu, menjadi sangat sentral dalam analisis Moore mengenai perlawanan sosial, yang juga meliputi revolusi sosial.²⁸

²⁸ Ibid hal 89

Dari analisis Kantian semacam ini, Moore lebih lanjut menjelaskan problem mengenai ketidakadilan sosial yang telah menyebabkan terjadinya banyak gerakan perlawanan. Ketidakadilan sosial adalah suatu derivasi pengertian dari keberangan moral yang dipengaruhi oleh tiga elemen penting dalam setiap sistem sosial: koordinasi sosial atau kekuasaan pembagian kerja, dan distribusi barang. Koordinasi sosial dan kekuasaan sebagai sebuah keharusan bagi masyarakat selalu dievaluasi dalam pengertian tentang kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada warganya dan memelihara kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Para anggota masyarakat, sebaliknya, mempunyai tanggung jawab untuk tunduk dan mentaati kekuasaan yang berlaku. Kewajiban timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai harus dipenuhi agar suatu masyarakat dapat memelihara kelangsungannya. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban timbal balik ini akan menyebabkan keberangan moral atau kerusakan sosial. Demikianlah, perlawanan terhadap kekuasaan akan terjadi jika masyarakat merasa bahwa kekuasaan tidak lagi memenuhi kewajiban-kewajiban moralnya yang mendasar.

Pembagian kerja juga dipengaruhi oleh otoritas moral. Kesenjangan sosial, menurut Moore, adalah inheren dalam setiap masyarakat. Pertanyaannya adalah sejauh mana kesenjangan itu bisa dibenarkan atau tidak secara moral. Kontrak sosial menentukan pembagian kerja diantara anggota-anggota masyarakat dan mencoba keselarasan diantara mereka melalui penanganan kepentingan-kepentingan individual “dalam suatu cara yang sedemikian rupa untuk membawa mereka kedalam harmoni dengan ketertiban sosial.” Kegagalan untuk menangani

kesenjangan sosial akan mengakibatkan keberangan moral yang mengambil bentuk pengutukan atau proses secara terang-terangan maupun tersembunyi. Isini pemenuhan “hak-hak” sosial menjadi penting karena ia menjamin (*guarantess*) kohesi sosial, semsntara pelanggaran atas hak-hak sosial akan mengakibatkan keberangan moral. Dalam konteks pembagian kerja perlindungan terhadap hak milik adalah salah satu diantara masalah paling penting, karena ia menentukan apakah pembagian kerja yang sudah ada dalam masyarakat bisa dibenarkan secara moral atau tidak.²⁹

Disamping kekuasaan dan pembagian kerja, distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat memainkan peranan untuk mengimbangi kontradiksi antara kesenjangan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak. Dari distribusi barang dan jasa ini, gagasan mengenai persamaan diasalkan. Kewajiban moral mempengaruhi apakah konsep mengenai persamaan ini bisa itafsirkan sebagai keadilan distributif atau tidak. Menurut Moore persamaan memainkan peran sebagi suatu bentuk jaminan sosial karena anggota masyarakat selalu dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas. Kegagalan anggota masyarakat untuk memenuhi kewajiban ini akan mengakibatkan kekecewaan dan keberagan moral.

Analisis Moore mengenai basis sosial kepatuhan dan perlawanan, jelas berbeda dari tradisi Marxis klasik yang menganggap hubungan produksi sebagai faktor determinan di dalam masyarakat. Demikian juga konflik kelas dan perjuangan kelas selalu terjadi hanya dalam hubungan-hubungan peroduksi yang eksploitatif, seperti yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Tentu Moore tidak

²⁹ Ibid hal 45

mengabaikan peranan hubungan produksi dalam membentuk kohensifitas sosial. Apa yang ditolakny adalah anggapan bahwa hubungan produksi adalah faktor utama yang menentukan hubungan sosial, dan gagasan Marxian mengenai moralitas sekadar sebagai epifenomena dari hubungan-hubungan produksi. Itu sebabnya ia meletakkan hubungan produksi didalam suatu kesalingkaitan dialektika dengan otoritas moral, tanpa perlu menganggapnya sebagai faktor determinan. Masalah mengenai kepatuhan dan perlawanan hanya bisa orang melihat dimensi moral secara memadai dan bukan dengan cara yang *deterministic*.

Analisis Milgram, sementara itu memberikan penjelasan berbeda mengenai penyebab-penyebab kepatuhan sosial pada kekuasaan. Dia mengemukakan argumen yang memberikan arti penting kepada imperatif-imperatif moral sebagai basis kepatuhan dan perlawanan terhadap kekuasaan. Menurut eksperimentasi laboratorisnya hukuman dan paksaan-paksaan dari luar untuk memainkan peranan menentukan dalam menciptakan kepatuhan dan melemahkan kemampuan perlawanan. Dengan demikian “kekuatan yang didesakkan oleh pengertian moral mengenai individu kurang efektif dibandingkan mitos sosial yang mungkin telah kita yakini.” Perlawanan terhadap kekuasaan hanya terjadi dengan dukungan kolektif, dan jarang sekali muncul dari kehendak individual. Dukungan sosial lebih berpengaruh untuk menciptakan perlawanan sosial ketimbang otoritas moral individual. Pengaruh kuat dari otoritas juga jelas dalam membentuk subyek yang taat. Menurut pengalamannya subyek ini melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan menganggap semua inisiatif dari yang mengalami sebagai suatu otoritas yang sah. Sebagai akibatnya, “ hilangnya

perasaan tanggung jawab merupakan konsekuensi paling jauh yang bisa dicapai akibat ketundukan pada kekuasaan.”kendatipun banyak orang tidak menyadari kesalahan apa yang mereka lakukan, mereka tidak menyertakan keyakinannya ke dalam tindakan yang menyebabkan timbulnya ketidaktaatan mereka.

Meskipun pengalaman milgram menunjukkan kelemahan otoritas moral sebagai basis dari ketidak patuhan dan perlawanan, akan tetapi pengalaman-pengalaman itu sama sekali tidak bisa menghilangkannya. Ini karena, menurut pengalaman Milgram, otoritas moral individu-individu tidaklah absen walaupun ia tidak menghasilkan timbulkan perlawanan terbuka. Khususnya ini benar dalam hal kepatuhan kepada suatu kekuasaan yang eksploitatif. Ditemukan bahwa ketundukan kepada kekuasaan cenderung menurun jika yang terahir ini absen atau jika orang yang tertundukkan, secara fisik menjadi korban. Dari kasus ini, jelas bahwa otoritas moral sedikit-tidaknya cukup potensial untuk melahirkan ketidaktaatan kepada eksplotatif. Lingkungan atau batas-batas structural mungkin saja penting dalam mencitakan tindakan perlawanan, tetapi hal-hal itu tidak bisa menghapuskan potensi imperative-imperatif moral.

Otoritas moral dari Moore dan *environmentalisme* Milgram, oleh karenanya, tidak bisa saling dirujukkan sebagai suatu penjelasan mengenai kepatuhan dan perlawanan sosial. Otoritas moral bebas dari keharusan structural, meskipun tidak berarti keduanya saling meniadakan satu sama lain. Argumen jenis ini dibela sarjana-sarjana yang berusaha merujukkan determinisme structural dan agen. Apa yang kini populer sebagai mazhab moral ekonomi Nampak mewakili pandangan ini. E.P. Thompson, sebagai seorang sejarawan Marxis,

terutama sangat tertarik pada hubungan dialektis antara agen dan struktur didalam poses historis. Dia mengkritik ekonimisme dan determinisme structural yang diyakini kaum Marxis yang jelas-jelas menyangkal pentingnya agen dalam perjuangan kelas dan formasi kelas. Dia khususnya menolak gagasan Alhtusseriant mengenai “ sejarah tanpa subyek “, yang begitu terkenal dikalangan kaum Marxis strukturalis bagi Thompson, fomasi sosial hanya bisa dipahami jika orang memasukkan agen didalam perkembangannya. Kelas bukan merupakan suatu kategori, tapi sesuatu yang terjadi didalam hubungan-hubungan manusia. Dengan menggunakan kalimatnya, kelas terjadi ketika beberapa orang, dengan pengalaman yang sama (yang diwariskan atau dibagikan), merasakan atau mengartikulasikan identitas dari kepentingan-kepentingannya, baik menyangkut diri mereka sendiri maupun orang-orang lain, yang kepentingan-kepentingannya berbeda dari dan biasanya bertentangan dengan) kepentingan-kepentingan mereka.

Segera menjadi jelas bahwa apa yang dimaksudkan Thompson dengan pengalaman bersama adalah keterbatasan-keterbatasan strukural (hubungan-hubungan produksi) maupun sistem-sistem nilai suatu masyarakat. Dia menganggap bahwa perjuangan kelas juga merupakan “perjuangan atas nilai-nilai” antara kelas yang berkuasa dengan kelas yang dikuasai. Moral ekonomi adalah salah satu diantara nilai-nilai yang berlaku memainkan peranan signifikan dalam proses perjuangan kelas. Buku Thompson, *The Moral Economy of the English Cowd in the Eighteen Century*, dan buku Scot, *he Moral Economy of the Peasant*, adalah dua conoh dari digunakannya tesis otoritas moral unuk

menjelaskan kepatuhan dan perlawanan sosial. Yang menjadi focus dalam studi-studi mereka adalah keyakinan bahwa terdapat suatu norma tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, yang digunakan sebagai legitimasi untuk dilakukannya protes sosial. Etika ini menyangkut norma-norma tradisional yang menyangkut hak kelas yang dikuasai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, dan kewajiban orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan paternalistiknya. Jika moral-moral ekonomi terancam, maka kelas yang dikuasai akan mencoba memertahankan dan hal itu akan mengakibatkan perlawanan sosial.³⁰

Jika kepatuhan dan perlawanan sosial merupakan proses dialektik yang melibatkan pengalaman dan sistem-sistem nilai, maka pertanyaan penting lainnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan dan perlawanan adalah dengan cara apa kepatuhan itu diciptakan oleh elite, dan dengan cara apa kelas yang dikuasai memberikan reaksinya. Itu sebabnya penting untuk menganalisis mekanisme control yang digunakan oleh elite untuk memelihara superioritasnya. Mekanisme ini tidak hanya terbatas pada control atas cara produksi, sebagaimana kaum Marxis tradisional menganggapnya, tetapi lebih penting lagi adalah control melalui hegemoni ideologis. Demikianlah, melalui hegemoni ideologis kepatuhan bisa dipaksakan dan perlawanan bisa dipatahkan atau dilenyapkan oleh elite. Pada saat yang sama, perlawanan bisa mengambil bentuk berupa upaya-upaya kontra-hegemoni oleh kelas yang dikuasai untuk melawan formasi sosial yang ada.

³⁰ Aswab Mahasin.1995.*Demokrasi Di Indonesia*.LP3ES.jakarta hal 17

E. Kerangka Teoritik

Terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami seluk-beluk gerakan sosial dalam tatanan masyarakat kontemporer sejak tahun 1960-an. Intelektual di Eropa mengembangkan pendekatan gerakan sosial baru (*New social Movements / NSM*) untuk memahami asal muasal timbulnya suatu gerakan. NSM merupakan istilah yang dikembangkan oleh tokoh sosiologi Prancis, Alain Touraine pada tahun 1975 dan sosiolog Italia Alberto Melucci pada tahun 1980. Gerakan sosial baru mengklaim sebagai gerakan sosial yang berbeda dari paradigma gerakan sosial konvensional. Yang baru dari gerakan ini adalah yang mereka perjuangkan tidak hanya terpaku pada redistribusi ekonomi atau gerakan kelas sosial. Berbagai isu yang diperjuangkan gerakan sosial ini, misalnya perjuangan untuk hak asasi manusia, perjuangan hak-hak kelompok gay, hak-hak perempuan, dampak globalisasi, dan sebagainya. Agenda yang diperjuangkan gerakan sosial baru mencakup kepentingan yang lebih luas dan mereka beraksi di luar mainstream politik. Awal Gerakan sosial baru adalah gerakan-gerakan yang mulai muncul pada tahun 1960-an. Gerakan ini menekan berbagai isu yang berbeda dari gerakan yang ada sebelumnya, yaitu gerakan sosial pada identitas, gaya hidup, dan budaya. Di sisi lain rekan-rekan mereka di yang di komandoi oleh McCarthy dan Zald (1977) Amerika Serikat mengembangkan teori mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory/RMT*) untuk memahami dampak

dan capaian gerakan.³¹ Pendekatan NSM lebih menekankan pada pemahaman cultural gerakan sosial serta memandangnya sebagai suatu perjuangan perebutan kendali atas produksi makna serta pembentukan suatu identitas kolektif baru. Pendekatan ini juga menempatkan gerakan sosial secara eksklusif didalam ranah *civil society*, dalam posisi yang bersebrangan dengan Negara, serta lebih menyoroti diskontinuitas serta perbedaan antara gerakan sosial kontemporer dan aktor-aktor kolektif yang lebih tradisional. Di pihak lain pendekatan RMT lebih menekankan pemahaman terhadap sisi politik dari gerakan sosial serta memandangnya sebagai konflik atas alokasi sumber daya dalam pasar politik. Ini menyebabkan pendekatan RMT lebih banyak membahas aspek teknis strategis aksi kolektif gerakan serta mengakomodasi peran Negara dalam gerakan sosial.

Pendekatan RMT memusatkan analisisnya pada seperangkat proses kontekstual (keputusan mengenai pengelolaan sumber daya, dinamika organisasi serta perubahan politik) yang memungkinkan gerakan sosial untuk mengoptimalkan potensi-potensi structural yang dimiliki guna mencapai tujuannya. Pendekatan ini menganalisis bagaimana para aktor gerakan sosial mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. munculnya gerakan sosial dan capaian dari aktivisme mereka dipandang sebagai hasil dari proses yang terbuka dan dipengaruhi oleh serangkaian taktik, strategi dan keputusan tertentu yang dipilih oleh para aktor dalam konteks relasi kuasa dan interaksi konfliktual yang ada.

³¹ Darmawan Triwibowo.2006.Gerakan sosial wahana *civil society* bagi demokratisasi. LP3ES.:Jakarta hal 8

Terdapat dua model analisis dan pendekatan RMT, model yang pertama adalah “*political interactive model*”, model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring, serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok tertindas sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan Negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika Negara kuat dan represif, maka gerakan sosial akan sulit untuk mencapai tujuannya demikian pula sebaliknya.³²

Model kedua adalah “*organizational entrepreneurial model*”, dalam hal ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan *carriers of social movements*. Tokoh ini membedakan antara gerakan sosial, organisasi gerakan sosial (*social movements organizations*), industry gerakan sosial (*social movements industry*) dan sector gerakan sosial (*social movement sector*). Menurut mereka organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks atau formal yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Kumpulan organisasi gerakan sosial yang menjadikan pencapaian preferensi gerakan sosial tertentu sebagai tujuannya pada akhirnya akan membentuk suatu industry gerakan sosial. Dan secara agregat pada

³² Hikam.Muhammad.1996.Demokrasi dan *Civil society*.Jakarta:LP3ES hal 159

akhirnya beragam industri tersebut (terlepas dari induk gerakan sosialnya) akan membentuk sektor gerakan sosial. Dalam konteks kemajemukan tersebut, organisasi gerakan sosial memainkan peran penting karena merupakan ujung tombak memobilisasi sumberdaya bagi pencapaian tujuan gerakan sosial.³³

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Disini penulis mengambil skripsi karya Asina Uli Sinaga yang berjudul Mahasiswa dan Politik suatu analisa gerakan mahasiswa melawan politik hegemoni Negara orde baru 1998. Dimana kesamaan dengan skripsi ini adalah terletak pada analisis gerakan sosial kemahasiswaannya sedangkan kedua skripsi ini memiliki focus yang sangat berbeda, dimana skripsi milik Asina ini lebih berfokus pada perlawanan dan politik saja sedangkan skripsi milik penulis disini berfokus pada ke gerakan penurunan presiden itu sendiri. Dan dibedakan pula oleh aktor tempat dan waktu penelitian yang jelas juga akan memberikan hasil yang berbeda pada kesimpulannya.

Persoalan yang diangkat pun lebih di titikberatkan pada penggambaran sejarah yang terjadi pada masa orde baru serta analisis politis tentang pergerakan mahasiswa ketika tragedi 1998 terjadi. Jadi dapat dikatakan pula bahwa skripsi yang sedang dikerjakan penulis sekarang adalah lanjutan dari analisis gerakan sosial yang ada di Indonesia.

³³ Ibid hal 34